

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu fondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Di Indonesia pendidikan sangat diutamakan, karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga tujuan pendidikan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu melalui masa depan.¹

Pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.²

¹ Oki Dermawan, 2016, *Partisipasi Wali Murid di Sekolah Dasar (SD) Kuttab Al Fatih Bandar Lampung*, Lampung: Jurnal Al-Idaroh Kependidikan Islam, hlm. 219

² H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (risiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan, maka seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, siswa, sarana sekolah dan fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Mengenai masalah mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah berbagai input, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, kesiswaan, keuangan, kurikulum, keorganisasian, dan berbagai kebijakan lainnya. Untuk menjalankan pendidikan dengan berbagai komponen tersebut dibutuhkan manajemen sebagai pengarah sekaligus bahan penggerak dalam menjalankan pendidikan. Sementara mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai atau hasil yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurung waktu tertentu. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan akan meningkat, jika dalam proses pembelajaran didukung dengan guru yang berkualitas, serta ditunjang berbagai sarana prasarana pendidikan. Maka dari itu, terwujudnya kompetensi siswa tergantung tersedianya

guru yang berkualitas, sarana prasarana yang keberadaannya tidak lepas dari besarnya anggaran pendidikan yang tersedia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk aktivitas pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, serta aktivitas pembiayaan operasional sekolah. Aktivitas-aktivitas sekolah tersebut akan terganggu apabila tidak didukung dengan anggaran pendidikan yang memadai. Semakin besar anggaran pendidikan, maka diperkirakan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan.

Berkaitan dengan anggaran pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun anggaran 2019, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar 20% dari APBN atau sebesar Rp492,5 triliun, naik 13,2% dari anggaran tahun 2018.³ Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama agar mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat.

Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien, semakin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan

³ Kemenkeu, 2019, *Informasi APBN 2019*, Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran 2019, hlm. 25

secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan dibidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Konsep pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan dari sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah anggaran yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sekolah swasta umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari Pemerintah Daerah, orang tua murid, masyarakat sekitar, dan sumber lainnya. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsi nya bervariasi diantara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari waktu ke waktu.⁴

Biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah tidaklah sedikit. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari 1) Biaya investasi, 2) Biaya personal dan 3) Biaya Operasional. Jadi biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan

⁴ Fattah. Nanang, 2002, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT. Rosda Karya, hlm. 23

pendidikan diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pembiayaan pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah yaitu: 1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan menengah merupakan bagian dari kebijakan pendidikan Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua.

Pendidikan wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam artian setiap Warga Negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan

pendidikan yang bermutu dan orang tua / walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan.⁵

Sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada tahun 2005 dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan mutu pendidikan pemerintah telah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan telah berperan signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun dan dilanjutkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun. Program BOS diharapkan akan memberikan dampak positif bagi madrasah, karena tanpa adanya dana BOS maka sekolah akan kesulitan untuk memenuhi biaya-biaya yang timbul akibat penyelenggaraan pendidikan. Program BOS juga ikut meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam biaya pendidikan, jadi seharusnya tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang tidak mengikuti pendidikan akibat terkendala dengan biaya pendidikan. Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional dan memenuhi syarat sebagai penerima berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di petunjuk teknis BOS. Besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang telah ter data didalam aplikasi EMIS (*Education Management Information System*), diantaranya untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp1.000.000,-/siswa.

Adanya program dana BOS menuntut setiap sekolah agar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan dana BOS haruslah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS di sekolah mempunyai peran yang besar untuk mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah.

Adanya kebijakan pemerintah melalui penyaluran dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pada pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan tidak efektifan pengelolaan dana BOS. Untuk menghindari tidak efektifan penggunaan dana BOS, maka diperlukan adanya kemampuan dari kepala sekolah sebagai manajer dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 diharapkan madrasah mampu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019; dan dapat memperlancar proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu dan tepat guna.

Berdasarkan kajian teoritis dan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait implementasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam

upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah:

“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MTs MIFTAHUL HUDA BULUNGAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020”.

B. Identifikasi Masalah

Program BOS sangat membantu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Diantaranya dana BOS mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orangtua murid, mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, semakin membantu madrasah dalam meningkatkan kualitas madrasah karena dengan dana BOS madrasah memiliki dana lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana madrasah. Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adanya bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di madrasah akan menjadi semakin meningkat.

Secara umum tujuan Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program wajar 12 Tahun. Sejauh mana pengelolaan dana BOS dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat menopang kegiatan operasional sekolah dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan Tahun Pelajaran 2019/2020?
2. Apa faktor penghambat pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan Tahun Pelajaran 2019/2020?
3. Bagaimana hasil pemenuhan standar pembiayaan pendidikan melalui manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Miftahul Huda Bulungan Tahun Pelajaran 2019/2020?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan Tahun Pelajaran 2019/2020.
2. Mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan Tahun Pelajaran 2019/2020.

3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana hasil pemenuhan standar pembiayaan pendidikan melalui manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Miftahul Huda Bulungan Tahun Pelajaran 2019/2020.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penelitian kali ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bahan kajian dalam peran kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di institusi pendidikan.
- b. Kepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang manajemen pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengambil kebijakan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan peran kepemimpinannya dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa yang akan datang.
- b. Peminat studi manajemen pendidikan Islam terutama bagi peneliti yang ingin mengungkapkan lebih dalam lagi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- c. Bagi peneliti dapat memberikan informasi aktual dalam mengembangkan diri sendiri.

F. Kerangka Penulisan Tesis

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell seperti dikutip oleh Raco mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.⁶ Adapun metode penulisan tesis ini terbagi dalam tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. **Bagian Awal**

Pada bagian awal ini terdiri dari Cover Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Pernyataan keaslian (bermaterai 10.000), Abstrak, Abstract, الملخص, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar.

2. **Bagian Utama**

Pada Bagian Utama tesis ini terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I, pada bagian satu ini adalah Pendahuluan yang terdiri atas beberapa Judul Sub Bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, pada bagian bab dua ini adalah Landasan Teori yang terdiri atas beberapa Judul Sub Bab yaitu: Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir.

BAB III, pada bagian Bab tiga ini adalah Metode Penelitian yang terdiri atas beberapa judul sub bab yaitu: Metode dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

⁶ Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, hlm. 7

BAB IV, Adapun pada bagian Bab empat ini adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri atas beberapa Judul sub bab yaitu: Deskripsi Data, Analisis Data, Pembahasan, Keterbatasan Penelitian.

BAB V, Adapun pada bab lima ini adalah Penutup yang terdiri atas dua judul sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran-saran.

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian akhir dari tesis ini adalah Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran.

